

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2017**



**INSPEKTORAT KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dapat dikerjakan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Inspektorat Kabupaten, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tahun 2014-2018.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014- 2018 dan Renstra Inspektorat Kabupaten 2014-2018.

Dalam penyusunan Rencana kerja Inspektorat Kabupaten ini, kami menyadari banyaknya kekurangan dan kelemahan yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Namun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten dilakukan searah dengan kebijakan prioritas yang disesuaikan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Dan kiranya penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektorat sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arawa, 10 Juli 2015

INSPEKTUR,

H. A. SAPPEWALL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311987091004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar belakang.....	1
I.2. Landasan hukum	3
I.3. Maksud dan tujuan.....	5
I.4. Sistematika penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	8
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Periode 2014-2018	8
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	15
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	19
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2017	20
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	28
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
III.2. Tujuan, dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat	28
III.3. Program dan Kegiatan	29
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.....	17
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017.....	27
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja).

Inspektorat Kabupaten telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Renstra Inspektorat Kabupaten menjadi acuan untuk melaksanakan misi ke-VI pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni **“Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yakni **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama Masyarakat Relegius Dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat”**.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tahun 2014-2018 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berorientasi pada hasil yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Inspektorat Kabupaten dalam periode 5 (lima) tahun ke depan bersifat indikatif.

Inspektorat Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2016 menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 yang berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun tema Pembangunan Tahun 2017 yaitu “ **Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan** ”.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 yang mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Pengelolaan Pemerintahan yang Baik.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten merupakan rencana tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 yaitu “Terciptanya Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, Efektifitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Profesionalisme Aparatur Inspektorat menuju Sidenreng Rappang maju dan terkemuka ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Inspektorat Kabupaten, misi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat.
2. Mewujudkan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kab. Sidrap.
4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kab. Sidrap.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan

Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

I. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;

I.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

I.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Sistematika penyajian Rencana Kerja Tahun 2017 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2017

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Kabupaten serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2014-2018

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Kabupaten Tahun 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Inspektorat Kabupaten tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan,

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

II.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat Kabupaten.

III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV : PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindaklanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2014-2018**

Inspektorat Kabupaten pada tahun 2015 telah melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan prioritas yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :

II.1.1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Dengan anggaran sebesar Rp. 344.043.000.00; realisasi anggaran sebesar 89.19 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, indikator output kegiatannya adalah :
 - Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 75.60%.
 - Terlaksananya pemeriksaan terpadu dengan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 200%.
 - Terlaksananya Pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 100%.
 - Terawasinya hasil pelaksanaan pembangunan fisik proyek SKPD / Unit Kerja, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 280%.
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, indikator output kegiatannya adalah :

- Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 60%.
- c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, indikator output kegiatannya adalah :
- Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda berdasarkan SAP, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 100%.
 - Terlaksananya Evaluasi Lakip, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 100%.
- d. Inventarisasi temuan pengawasan, indikator output kegiatannya adalah :
- Termanfaatkannya data temuan hasil pemeriksaan, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 100%.
- e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, indikator output kegiatannya adalah :
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 100%.

II.1.2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Dengan anggaran sebesar Rp. 61.800.00.00 ; realisasi anggaran sebesar 77.89 %, Indikator programnya adalah : Tersedianya tenaga pemeriksa yang memenuhi standar pemeriksa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, indikator output kegiatannya adalah :
- Tersedianya Sumber Daya Manusia pengawasan dan Jabatan Fungsional Auditor yang profesional, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 71.42%.
- b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, indikator output kegiatannya adalah :

- Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2015 diketahui bahwa capaian kinerja sebesar 117% dengan capaian realisasi keuangan senilai 83.54%.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 terdiri dari 2 program dan 7 kegiatan dengan anggaran senilai Rp. 470.843.000. Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten tahun 2016 akan dievaluasi setiap semesternya dan diproyeksikan bahwa seluruh program dan kegiatan tahun berjalan akan dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%.

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra SKPD *dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :*

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2016
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2016		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	Urusan Wajib										
1.20.	Pemerintahan Umum										
1.20.06	Inspektorat										
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
5.2.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan, melalui pemeriksaan kinerja SKPD, asistensi dan pembinaan									
	1. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD	1.Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD 2. Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan	202 LHP	25	41	31	75,61	41	97 LHP	48,02	
	2. Pemeriksaan Terpadu dengan Inspektorat Provinsi, Inspektorat K/L Pemerintah non Kementerian, BPKP, BPK	Terlaksananya pendampingan, joint audit dengan aparat pengawasan internal dan eksternal	5 keg	1	1	2	200	1	4 Keg.	80,00	
	3. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD	1.Termanfaatkannya hasil pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD	70 SKPD	-	10	10	100	15	25 SKPD	35,71	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2016		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	4. Pemeriksaan proyek fisik	1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan proyek 2. Terlaksananya pemeriksaan fisik proyek pembangunan	500 proyek	140	100	280	280	100	520 Proyek	104,00	
5.2.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	meningkatnya penerapan SPIP, pelaksanaan evaluasi LAKIP dan reviu laporan keuangan sesuai SAP, Evaluasi PMPRB	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1. Reviu Laporan Keuangan pemda Sidrap	1. Termanfaatkannya laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda Sidrap 2. Terlaksananya Reviu laporan keuangan Pemda Sidrap	5 LHR	1	1	1	100	1	3 LHR	60,00	
	2. Evaluasi SPIP	1. Termanfaatkannya laporan Evaluasi SPIP SKPD 2. Terlaksananya Evaluasi SPIP Pemda Sidrap	50 laporan	-	5	-	-	10	- -	-	
	3. Evaluasi LAKIP	1. Termanfaatkannya laporan Evaluasi Lakip SKPD Kab.Sidrap 2. Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD Kab. Sidrap	164 Laporan	-	41	41	100	41	82 Laporan	50,00	
5.2.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	1. Termanfaatkannya laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 2. Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	25 Kasus	3	5	3	60,00	5	11 Kasus	44,00	
5.2.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	1. Termanfaatkannya data temuan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Sidrap 2. Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan	42 Kegiatan	-	6	6	100	12	18 Kegiatan	42,86	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2016		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5.2.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	1. Terpantaunya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD Kabupaten Sidrap 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.	16 Laporan	-	4	4	100	4	8 Laporan	50,00	
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan										
5.2.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat fungsional		-							
	1. Diklat/ujian pembentukan fungsional	1. Meningkatnya SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksananya kepesertaan mengikuti diklat pembentukan ahli auditor dan P2UPD	33 org	4	5	6	100	7	17 Org	51,52	
	2. Diklat/ujian penjenjangan fungsional	1. Meningkatnya SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksananya kepesertaan mengikuti diklat/ujian penjenjangan fungsional	12 org	5	2	-	0	2	7 Org	58,33	
5.2.21.02	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat penulisan LHP yang efektif dan diklat teknis/bimtek lainnya.		-							
	1. Pelatihan Penulisan LHP yang efektif	1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melaluidiklat/bimtek penulisan LHP yang efektif	20 org	-	2	-	-	4	4 Org	20,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2016		Catatan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	2. Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis	1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan/bimtek pengawasan .	30 org	-	3	2	67,00	6	8 Org	26,67	
	3. Pelatihan Kantor Sendiri	1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan kantor sendiri	125 Notulen	15	20	24	120	25	64 Notulen	51,20	

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

1. Kualitas dan jumlah SDM aparatur pengawasan yang masih dirasa kurang khususnya fungsional auditor/P2UPD sedangkan ruang lingkup pengawasan semakin luas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan.
3. Terbatasnya anggaran pengawasan.

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun mendatang, yaitu :

1. Mengajukan rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui berbagai pelatihan/diklat baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang diselenggarakan oleh instansi terkait sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mengatasi masalah keterbatasan anggaran ditetapkan skala prioritas dalam penetapan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Inspektorat Kabupaten melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit), monitoring,

evaluasi, dan review. Selain itu, Inspektorat Kabupaten juga menetapkan kegiatan Non PKPT untuk melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan Non PKPT antara lain terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Fungsional dan BPK RI, serta koordinasi pengawasan secara komprehensif.

Khusus untuk Inspektorat Kabupaten sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat Kabupaten yang secara umum merujuk pada Kementerian PAN dan RB, BPKP maupun APIP lainnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten *dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :*

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya Diklat Pembentukan dan penjenjangan JFA dan P2UPD untuk 45 Orang			7 Orang	9 Orang	11 Orang	13 Orang	6 Orang	4 Orang	6 Orang	8 Orang	
2	Terlaksananya Diklat Penulisan LHP yang efektif dan diklat/bimtek teknis lainnya untuk 50 orang			5 Orang	10 Orang	15 Orang	20 Orang	2 Orang	4 Orang	6 Orang	8 Orang	
3	Terbinanya SKPD setiap tahunnya			10 SKPD	15 SKPD	20 SKPD	25 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	20 SKPD	25 SKPD	
4	Terlaksananya pemeriksaan terpadu dengan Aparat pengawas Internal dan Eksternal			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
5	Terlaksananya pemeriksaan kinerja/regular pada SKPD			41 LHP	41 LHP	41 LHP	41 LHP	31 LHP	7 LHP	41 LHP	41 LHP	
6	Terinventarisasinya data temuan hasil pemeriksaan			6 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	
7	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pengawasan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	
8	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda berdasarkan SAP			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
9	Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD 41 SKPD per tahun			41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	-	41 Laporan	41 Laporan	

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
10	Terlaksananya Evaluasi SPIP SKPD			5 Laporan	10 Laporan	15 Laporan	20 Laporan	-	-	15 Laporan	20 Laporan	
11	Terawasinya hasil pelaksanaan pembangunan fisik proyek SKPD/Unit Kerja sebanyak 500 Proyek			100 Proyek	100 Proyek	100 Proyek	100 Proyek	280 Proyek	20 Proyek	100 Proyek	100 Proyek	
12	Tertanganinya 25 kasus pengaduan masyarakat dalam 5 tahun			5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perubahan sistem manajemen pemerintahan daerah dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku APIP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya sistem pengawasan intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip good governance.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis ditetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Inspektorat Kabupaten merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan inspektorat sebagai *Counsultant Partner*.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang serta Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten khususnya.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi temuan pengawasan dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur, pengawas dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan dan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Analisis kebutuhan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten *dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :*

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	
			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH				1.777.220	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH				1.777.220	
1.20.06 ..20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	SKPD/Unit Kerja sekabupaten Sidrap	Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan, melalui pemeriksaan kinerja SKPD, asistensi dan pembinaan.		1.655.020	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	SKPD/Unit Kerja sekabupaten Sidrap	Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan, melalui pemeriksaan kinerja SKPD, asistensi dan pembinaan.		1.655.020	
	1. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD		1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD 2. Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan	41 LHP	1.004.520	1. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD		1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD 2. Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan	41 LHP	1.004.520	
	2. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Provinsi, Inspektorat K/L Pemerintah Non Kementerian, BPKP		1. Terlaksananya pendampingan aparat pengawasan internal dan eksternal	1 keg	10.500	2. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Provinsi, Inspektorat K/L Pemerintah Non Kementerian, BPKP		1. Terlaksananya pendampingan aparat pengawasan internal dan eksternal	1 keg	10.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	
			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD		1. Termanfaatkannya hasil pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD	20 SKPD	570.000	3. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD		1. Termanfaatkannya hasil pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD	20 SKPD	570.000	
	4. Pemeriksaan proyek fisik		1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan proyek 2. Terlaksananya pemeriksaan fisik proyek pembangunan	100 proyek	70.000	4. Pemeriksaan proyek fisik		1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan proyek 2. Terlaksananya pemeriksaan fisik proyek pembangunan	100 proyek	70.000	
1.20.06 . 20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		meningkatnya penerapan SPIP, pelaksanaan evaluasi LAKIP dan reuiu laporan keuangan sesuai SAP, Evaluasi PMPRB		55.500	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		meningkatnya penerapan SPIP, pelaksanaan evaluasi LAKIP dan reuiu laporan keuangan sesuai SAP, Evaluasi PMPRB		55.500	
	1. Reviu Laporan Keuangan pemda Sidrap		1. Termanfaatkannya laporan Reviu Laporan Keungan Pemda Sidrap 2. Terlaksananya Reviu laporan keuangan Pemda Sidrap	1 LHR	10.500	1. Reviu Laporan Keuangan pemda Sidrap		1. Termanfaatkannya laporan Reviu Laporan Keungan Pemda Sidrap 2. Terlaksananya Reviu laporan keuangan Pemda Sidrap	1 LHR	10.500	
	2. Evaluasi SPIP		1. Termanfaatkannya laporan Evaluasi SPIP SKPD 2. Terlaksananya Evaluasi SPIP Pemda Sidrap	15 Laporan	20.000	2. Evaluasi SPIP		1. Termanfaatkannya laporan Evaluasi SPIP SKPD 2. Terlaksananya Evaluasi SPIP Pemda Sidrap	15 Laporan	20.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	
			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Evaluasi LAKIP		1. Termanfaatkannya laporan Evaluasi Lakip SKPD Kab.Sidrap 2. Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD Kab. Sidrap	41 Laporan	25.000	3. Evaluasi LAKIP		1. Termanfaatkannya laporan Evaluasi Lakip SKPD Kab.Sidrap 2. Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD Kab. Sidrap	41 Laporan	25.000	
1.20.06 . 20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda		1. Termanfaatkannya laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 2. Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	5 kasus	37.500	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda		1. Termanfaatkannya laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 2. Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	5 kasus	37.500	
1.20.06 . 20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan		1. Termanfaatkannya data temuan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Sidrap 2. Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan	12 Keg.	22.000	Inventarisasi Temuan Pengawasan		1. Termanfaatkannya data temuan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Sidrap 2. Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan	12 Keg.	22.000	
1.20.06 . 20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		1. Terpantaunya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD Kabupaten Sidrap 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.	4 Laporan	7.200	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		1. Terpantaunya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD Kabupaten Sidrap 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.	4 Laporan	7.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	
			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Dalam/Luar Propinsi			232.224	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Dalam/Luar Propinsi			232.224	
1.20.06 .21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat fungsional		97.224	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat fungsional		97.224	
	1. Diklat/ujian pembentukan fungsional		1. Meningkatnya SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksannya kepesertaan mengikuti diklat pembentukan ahli auditor dan P2UPD	7 org	60.904	1. Diklat/ujian pembentukan fungsional		1. Meningkatnya SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksannya kepesertaan mengikuti diklat pembentukan ahli auditor dan P2UPD	7 org	60.904	
	2. Diklat/ujian penjenjangan fungsional		1. Meningkatnya SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksannya kepesertaan mengikuti diklat/ujian penjenjangan fungsional	4 org	36.320	2. Diklat/ujian penjenjangan fungsional		1. Meningkatnya SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksannya kepesertaan mengikuti diklat/ujian penjenjangan fungsional	4 org	36.320	
1.20.06 .21.02	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja		Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat penulisan LHP yang efektif dan diklat teknis/bimtek lainnya.		135.000	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja		Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat penulisan LHP yang efektif dan diklat teknis/bimtek lainnya.		135.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	
			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)			Kinerja	capaian	Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pelatihan Penulisan LHP yang efektif		1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melaluidiklat/bimtek penulisan LHP yang efektif	6 org	54.000	1. Pelatihan Penulisan LHP yang efektif		1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melaluidiklat/bimtek penulisan LHP yang efektif	6 org	54.000	
	2. Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis		1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan/bimtek pengawasan .	9 org	62.176	2. Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis		1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan/bimtek pengawasan .	9 org	62.176	
	3. Pelatihan Kantor Sendiri		1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan kantor sendiri .	30 Notulen	18.824	3. Pelatihan Kantor Sendiri		1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan kantor sendiri .	30 Notulen	18.824	
Jumlah						2.009.444				2.009.444	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders. Hal ini *dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :*

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat khususnya pada tugas-tugas di Bidang Pengawasan/pemeriksaan

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten adalah INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten akan mendukung keberhasilan INPRES tersebut.

Sampai dengan saat ini belum ada lagi Kebijakan-kebijakan Nasional mengenai kepengawasan, sehingga kami pun belum merubah Program dan Kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Periode 2014-2018.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2014-2018 sebagai berikut :

III.2.1 Tujuan

Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan.
4. Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan masyarakat.
5. Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
6. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah

III.2.2 Sasaran

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten sesuai dengan jejang pendidikannya.
2. Terpenuhinya Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.
4. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten.
7. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah berdasarkan hasil reviu dan evaluasi APIP.
8. Terciptanya pengelolaan keuangan dan Asset daerah yang berkualitas, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2016 kami belum dapat melakukan evaluasi progress pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun ini masih berlangsung, selain itu kami pun tidak melakukan penyesuaian target dikarenakan belum adanya perubahan kebijakan pengawasan ditingkat nasional.

III.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian kinerja tahun 2017 terbagi dalam 2 program dan 7 kegiatan prioritas. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017. Program dan Kegiatan prioritas tersebut yaitu :

III.3.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH, terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
3. Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda
4. Inventarisasi Temuan Pengawasan
5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

III.3.2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terdiri dari :

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2. Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2014 – 2018 juga didukung dengan program dan kegiatan penunjang yaitu :

III.3.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Penyediaan bahan bacaan dan Per Undang-Undangan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
11. Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor.
12. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
13. Rapat-Rapat Koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke Dalam Daerah.

III.3.4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Meubeleir
3. Pengadaan Peralatan kantor.
4. Pengadaan Perlengkapan kantor.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.

III.3.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penilaian Angka Kredit JFA.

Rumusan rencana program dan kegiatan *dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :*

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib								
1	Pemerintahan Umum								
1	Inspektorat								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				591.949.500				621.133.500
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Benda Pos dan Jasa pengiriman	Inspektorat	460 lbr	3.220.000	APBD		480 lbr	3.360.000
	02 Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik, Telpon	Inspektorat	12 Bulan	56.000.000	APBD		12 Bulan	62.500.000
	03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	Unit	20.000.000	APBD		Unit	25.000.000
	05 Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Tersedianya jaminan barang milik daerah	Inspektorat	4 unit	35.000.000	APBD		4 unit	35.000.000
	06 Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Inspektorat	19 unit	9.550.000	APBD		19 unit	7.550.000
	07 Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi keuangan	Inspektorat	12 Bulan	50.300.000	APBD		12 Bulan	50.300.000
	08 Jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	Inspektorat	12 Bulan	23.226.000	APBD		12 Bulan	24.387.000
	12 Penyediaan Komponen Listrik	Tersedianya penerangan kantor	Inspektorat	12 Bulan	2.500.000	APBD		12 Bulan	2.650.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUU	Tersedianya bahan bacaan dan per-UU	Inspektorat	60 terbitan	12.150.000	APBD		60 terbitan	12.700.000
	18	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di luar daerah	BPK, BPKP, Irjen, Kementerian/ Lembaga, Inspektorat Propinsi/Kab.	12 Bulan	171.600.000	APBD		12 Bulan	182.300.000
	19	Rapat Koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam daerah	Kabupaten Sidrap	12 Bulan	29.400.000	APBD		12 Bulan	31.900.000
	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	Inspektorat						
		Penyediaan Honor	Terpenuhinya Honor	Inspektorat	12 Bulan	34.655.000	APBD		12 Bulan	36.375.000
		Penyediaan ATK	Tersediannya kebutuhan ATK	Inspektorat	12 Bulan	31.142.000	APBD		12 Bulan	32.699.000
		Penyediaan barang cetak dan Penggadaan, Penjilidan	Tersediannya Kebutuhan cetak dan penggadaan, Penjilidan	Inspektorat	12 Bulan	24.129.000	APBD		12 Bulan	25.335.000
		Penyediaan Makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman	Inspektorat	11 Bulan	89.077.500	APBD		11 Bulan	89.077.500
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			304.022.500				421.706.820
	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	Inspektorat	-	-	APBD		-	-
	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	Inspektorat	14 unit	72.267.500	APBD		19 unit	121.116.000
	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	2 unit	24.000.000	APBD		2 unit	24.000.000
	10	Pengadaan Meubiler	Tersediannya meubiler	Inspektorat	68 unit	97.714.250	APBD		83 unit	105.296.000
	22	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Inspektorat	-	-	APBD		1 keg.	50.000.000
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	19 unit	110.040.750	APBD		19 unit	121.294.820

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	20	20			1.777.220.000				1.827.800.000	
		01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH							
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan, melalui pemeriksaan kinerja SKPD, asistensi dan pembinaan.	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap				1.700.600.000	
			1. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD	1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD 2. Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	41 LHP	1.004.520.000	APBD	41 LHP	990.100.000
			2. Terlaksananya pemeriksaan terpadu dengan Aparat pengawas Internal dan Eksternal	1. Terlaksananya pendampingan aparat pengawasan internal dan eksternal	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	1 keg	10.500.000	APBD	1 keg	10.500.000
			3. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD	1. Termanfaatkannya hasil pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya pendampingan, asistensi dan fasilitasi SKPD	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	20 SKPD	570.000.000	APBD	25 SKPD	630.000.000
			4. Pemeriksaan proyek fisik	1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan proyek 2. Terlaksananya pemeriksaan fisik proyek pembangunan	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	100 proyek	70.000.000	APBD	100 proyek	70.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			55.500.000	APBD			60.500.000
		1. Reviu Laporan Keuangan pemda Sidrap	Pemda kabupaten Sidrap	1 LHR	10.500.000	APBD		1 LHR	10.500.000
		2. Evaluasi SPIP	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	15 laporan	20.000.000	APBD		20 laporan	25.000.000
		3. Evaluasi LAKIP	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	41 Laporan	25.000.000	APBD		41 Laporan	25.000.000
	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	5 kasus	37.500.000	APBD		5 kasus	37.500.000
	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	12 Keg	22.000.000	APBD		12 keg.	22.000.000
	08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten Sidrap	4 Keg	7.200.000	APBD		4 laporan	7.200.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	21			232.224.000				277.224.000
		01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat fungsional					117.224.000
			1. Diklat/ujian pembentukan fungsional	1. Meningkatkan SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksannya kepesertaan mengikuti diklat pembentukan ahli auditor dan P2UPD	BPK, BPKPIrjen, Inspektorat dan Lembaga Diklat Lainnya	7 org	60.904.000	APBD	9 org 80.904.000
			2. Diklat/ujian penjenjangan fungsional	1. Meningkatkan SDM bagi Aparat Pengawasan 2. Terlaksannya kepesertaan mengikuti diklat/ujian penjenjangan fungsional	BPK, BPKPIrjen, Inspektorat dan Lembaga Diklat Lainnya	4 org	36.320.000	APBD	4 org 36.320.000
		02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan melalui diklat penulisan LHP yang efektif dan diklat teknis/bimtek lainnya.			135.000.000		160.000.000
			1. Pelatihan Penulisan LHP yang efektif	1. Meningkatkan sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksannya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui diklat/bimtek penulisan LHP yang efektif	BPK, BPKPIrjen, Inspektorat dan Lembaga Diklat Lainnya	6 org	54.000.000	APBD	8 org 64.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2017				Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2. Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis	1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan/bimtek pengawasan .	BPK,BPKPIrjen, Inspektorat dan Lembaga Diklat Lainnya	9 org	62.176.000	APBD		12 org	77.176.000	
	3. Pelatihan Kantor Sendiri	1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan kantor sendiri .	BPKP, Inspektorat	30 Notulen	18.824.000	APBD		35 Notulen	18.824.000	
1	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					17.000.000	17.000.000	
		01	Penyusunan Dokumen Program perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar kinerja	1. Termanfatkannya bahan evaluasi pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sidrap 2. Terlaksananya penyusunan LAKIP, Renstra, RKPD, Renja,DPA,RKA	Inspektorat	7 Laporan	10.000.000	APBD	7 Laporan	10.000.000
			Penilaian Angka Kredit JFA	1. Termanfaatkannya angka kredit bagi pajabat fungsional auditor. 2. Terlaksananya perhitungan dan penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor.	Inspektorat	2 Laporan	7.000.000	APBD	2 Laporan	7.000.000
JUMLAH								2.922.416.000	3.164.864.320	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Meskipun dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian dengan keterbatasan yang ada serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten pada Tahun 2017, serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh stakeholders pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Kabupaten dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 8 April 2016

**INSPEKTUR KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

H. A. SAPPEWALI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311987091004